

ABSTRAK

MUHAMMAD IQBAL LATIEF. Kedaulatan Politik kelompok Miskin Pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018 di Makassar (Promotor Prof.Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu. MA, Ko-Promotor Prof.Dr. Armin Arsjad. MA, Ko-Promotor Dr. Rahmat Muhammad. MSi)

Penelitian ini bertujuan, untuk; (1) menganalisis pemahaman kelompok miskin terhadap kedaulatan politiknya dari sisi persepsi dan implementasi; (2) menganalisis tipologi pertukaran sosial Kedaulatan politik Kelompok Miskin pada Pemilihan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 di kota Makassar; (3) menganalisis dan mengidentifikasi aspek-aspek yang berperan pada kelompok miskin dalam melaksanakan kedaulatan politiknya pada Pemilihan Gubernur Sulsel tahun 2018 di kota Makassar.

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Informan penelitian sebanyak 16 (enam belas) orang yang terdiri atas 7 orang dari pemilih kelompok miskin, 3 orang dari penyelenggara Pilkada, 2 orang dari tim sukses kandidat, 2 orang tokoh masyarakat, 1 orang dari organisasi *civil society*, dan 1 orang akademisi. Keseluruhan informan, ditentukan secara *purposive sampling*. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi berpartisipasi, studi literatur dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dan untuk menverifikasi data dilakukan wawancara mendalam dengan informan yang sama. Penyajian data dilakukan dalam bentuk naratif, deskriptif dan sajian matriks.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman kedaulatan politik di kalangan pemilih kelompok miskin, masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan kemampuan memahami makna simbolik dari kedaulatan, yang terbatas pada suara, uang, sembako dan imbalan lainnya. Padahal esensi kedaulatan politik, tidak boleh diperjual belikan, dihadiahkan atau diserahkan. Terdapat sejumlah faktor yang berpengaruh seperti pemikiran (*mind*), hasil interaksi (*self*), nilai dan norma di masyarakat dan pengalaman. Namun hasil penelitian ini, menemukan bahwa terdapat 2 faktor yang juga berpengaruh yaitu faktor pendidikan dan strata sosial ekonomi.

Rendahnya pemahaman tentang kedaulatan politik, berimplikasi terhadap model pertukaran sosial yang dilakukan pemilih kelompok miskin. Walaupun ada 3 model pertukaran yaitu intrinsik, ekstrinsik, dan bauran. Namun model instrinsik dan bauran, tidak ditemukan dan yang dominan model pertukaran ekstrinsik (materi, ekonomi). Bahkan hasil penelitian ini menemukan model pertukaran baru yaitu tipologi pertukaran “bandit”, karena tim sukses dan pemilih kelompok miskin memperoleh keuntungan yang tidak wajar. Sebaliknya, kandidat menderita kerugian material dan sosial.

Walaupun dalam pemahaman pemilih kelompok miskin, perilaku, sikap dan tindakan yang dilakukan dalam Pilgub Sulsel tahun 2018 dinilai sebagai tindakan atau pilihan rasional. Namun dalam perspektif kedaulatan rakyat dan demokrasi, tindakan tersebut justru bertentangan dengan hakikat dan prinsip demokrasi dan makna kedaulatan rakyat yang sesungguhnya. Penelitian ini mengidentifikasi, terdapat lima aspek berpengaruh yang menyebabkan perilaku, sikap dan tindakan pemilih kelompok miskin masih tidak sesuai dengan upaya membangun demokrasi di Sulsel dan Indonesia secara umum. Pertama, aspek pendidikan dan sosialisasi. Kedua, aspek ekonomi. Ketiga, aspek hukum. Keempat, aspek sosial budaya, dan. Kelima, aspek moralitas.

Dengan hasil penelitian ini, maka disarankan untuk dilakukan perbaikan dari sisi mikro (individu), mezzo (kelompok sosial) dan makro (kebijakan negara).

Kata Kunci : Kedaulatan, Politik, Kelompok Miskin, Pemilihan Gubernur, Makassar

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR ISTILAH/TERJEMAHAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	15
1.4 Manfaat Penelitian	16
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR	
2.1 Kajian Tentang Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia	19
2.2 Tinjauan Tentang Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi	37
2.3 Tinjauan Tentang Partisipasi Politik dan Fenomena Politik Uang	60
2.4 Tinjauan Tentang Kemiskinan dan Kelompok Miskin	80
2.5 Teori-Teori Yang Relevan	92
2.5.1 Teori Pertukaran Sosial	93
2.5.2 Teori Pilihan Rasional	120
2.5.3 Teori Interaksionisme Simbolik	128
2.6. Penelitian Terdahulu	142
2.7 Kerangka Fikir	145

BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Paradigma Penelitian	148
3.2. Jenis Penelitian	155
3.3. Informan Penelitian	157
3.4. Waktu dan Lokasi Penelitian	160
3.5. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	161
3.6. Teknik Analisa Data	164
3.7. Konteks Penelitian	165
3.8. Alur Penelitian	169
3.9. Keterbatasan Penelitian	170
 BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
4.1. Kota Makassar Sebagai Barometer Politik Sulawesi Selatan	171
4.2. Keadaan Penduduk dan Kemiskinan di Kota Makassar	174
4.3. Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 di Kota Makassar	179
4.3.1. Tahap Persiapan	184
4.3.2. Tahap Pelaksanaan	225
4.3.3. Tahap Evaluasi	278
4.4. Profil Informan	287
 BAB V PEMAHAMAN KEDAULATAN POLITIK KELOMPOK MISKIN PADA PILGUB SULSEL TAHUN 2018	
5.1. Pemahaman Kedaulatan Rakyat Kelompok Miskin	291
5.2. Interaksi Simbolik Kelompok Miskin, Kandidat dan Tim Sukses	309
5.3. Perwujudan Kedaulatan Politik Kelompok Miskin	323
5.4. Problematika Kedaulatan Politik Kelompok Miskin	338
 BAB VI TIPOLIGI PERTUKARAN SOSIAL KELOMPOK MISKIN DALAM PILGUB SULSEL	
6.1. Pertukaran Intrinsik Kelompok Miskin	357
6.2. Pertukaran Ekstrinsik Kelompok Miskin	371
6.2.1. Indeks dan Modus Pertukaran	376
6.2.2. Tipe Pertukaran Tidak Seimbang	382
6.2.3. Tipe Pertukaran Konsisten	389
6.2.4. Tipe Pertukaran “Omnivora” (pemakan Semua)	394
6.2.5. Tipe Pertukaran Distribusi Merata	400

6.3	Pertukaran Bauran Kelompok Miskin	406
6.4	Pertukaran “ Bandit “ Kelompok Miskin	413
6.4.1.	Tim Sukses Mengurangi Nilai pertukaran	425
6.4.2	Tim Sukses Ingkar Janji	431
6.4.3	Pertukaran Yang Lebih Tinggi	438
6.4.4	Inkonsistensi Pemilih	442
BAB VII BEBERAPA ASPEK YANG BERPENGARUH DALAM IMPLEMENTASI KEDAULATAN POLITIK KELOMPOK MISKIN		
7.1	Aspek Pendidikan dan Sosialisasi	450
7.2	Aspek Ekonomi	468
7.3	Aspek Hukum	474
7.4	Aspek Sosial Budaya	489
7.5	Aspek Moralitas	496
BAB VIII PENUTUP		
8.1	Kesimpulan	503
8.2.	Implikasi Teoretis	508
8.2	Saran-saran	515
DAFTAR PUSTAKA		518
Curriculum Vitae		523
Lampiran :		
Pedoman Wawancara		528
Matriks Hasil Wawancara		531

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Sistem Pemilihan Kepala Daerah yang Berlaku di berbagai masa di Indonesia
Tabel 2	: Bentuk-bentuk Partisipasi Politik
Tabel 3	: Distribusi Kelurahan, RT/RW di Kota Makassar
Tabel 4	: Jumlah Penduduk, Rasio Jenis kelamin Menurut Kecamatan di Makassar
Tabel 5	: Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota di Sulsel 2015-2017
Tabel 6	: Jumlah Kepala Keluarga Miskin Penerima Raskin perKecamatan di Makassar
Tabel 7	: Anggaran Pemilihan Gubernur/Wagub (Pilgub) Sulsel Tahun 2018
Tabel 8	: Alokasi Anggaran Pilgub Sulsel tahun 2018
Tabel 9	: Distribusi Jumlah PPK, PPS & KPPS Pilgub Sulsel tahun 2018
Tabel 10	: Peraturan PKPU & Juknis Pilgub Sulsel tahun 2018
Tabel 11	: Distribusi Kegiatan Rakor, Bintek dan Sosialisasi Pilgub Sulsel tahun 2018
Tabel 12	: Perbandingan DP4, DPS, DPT Pilgub Sulsel tahun 2018
Tabel 13	: Rekapitulasi DPT Pilgub Sulsel tahun 2018
Tabel 14	: Waktu & Urutan Pendaftaran Bapaslon Pilgub Sulsel tahun 2018
Tabel 15	: Paslon & Nomor Urut di Pilgub Sulsel tahun 2018
Tabel 16	: Distribusi Fasilitas Kampanye Paslon Pilgub Sulsel tahun 2018
Tabel 17	: Pelaksanaan Debat Publik Pilgub Sulsel tahun 2018
Tabel 18	: Pembatasan Dana Kampanye Paslon Pilgub Sulsel tahun 2018
Tabel 19	: Hasil Perhitungan & Rekatulisasi Perolehan Suara Pilgub Sulsel 2018

DAFTAR ISTILAH/TERJEMAHAN

- PILGUB** = Pemilihan Gubernur untuk memilih pasangan Gubernur/Wakil Gubernur
- KANDIDAT** = Pasangan Calon yang ikut dalam pemilihan Gubernur baik lewat jalur perseorangan maupun partai politik
- TIM SUKSES** = Tim yang dibentuk kandidat untuk menjaring suara pemilih untuk memenangkan Pilgub baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar
- AD-HOC** = Penyelenggara pelaksanaan Pilgub yang bersifat sementara dibawah Komando atau perintah KPU di setiap jenjang. Penyelenggara adhoc di tingkat kecamatan disebut PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), di tingkat kelurahan/desa disebut PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan di tingkat TPS disebut KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara).
- TPS** = Tempat Pemungutan Suara yang lokasinya didekat pemilih setempat
- PKPU** = Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai aturan operasional dari Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah
- KPU** = Komisi Pemilihan Umum disingkat KPU yang memiliki tugas, pokok dan fungsi untuk melaksanakan seluruh tahapan Pilkada termasuk Pilgub Sulsel
- BAWASLU** = Badan Pengawas Pemilu disingkat BAWASLU yang memiliki tugas, pokok dan fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan Pilkada termasuk Pilgub Sulsel